DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Aryo Jati Ardipandanto, Prayudi, Ahmad Budiman dan Aulia Fitri. *Peranan DPRD dalam Pengambilan Kebijakan Daerah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.

Busrizalti. *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*. Yogyakarta: Total Media, 2013.

Dadang Suwanda dan Akmal Malik Piliang. *Penguatan Pengawasan DPRD untuk Pemerintahan Daerah yang Efektif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.

Dadang Suwanda. *Peningkatan Fungsi DPRD dalam Penyusunan Perda yang Responsif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.

H.A. Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.

Ilmi Usrotin Choiriyah dan Lailul Mursyidah. *Buku Ajar Administrasi Pemerintah Daerah*. Sidoarjo: UMSIDA Press, 2020.

J. Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Jaidun. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Malang: Madza Media, 2023.

Jimly Asshiddiqie. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.

Krismono. *Fikih Siyasah*. Yogyakarta: UII Press, 2024.

Lukman Santoso. *Hukum Pemerintahan Daerah Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Mohamad Mustari dan M. Taufiq Rahman. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2012.

Muchtar Hadi Saputra. *Konstitusi Rakyat: Partisipasi Masyarakat dalam Perubahan Undang-Undang Dasar*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.

Ni'matul Huda. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2009.

_____, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

___, *Otonomi Daerah: Dinamika Hubungan Pusat dan Daerah Pasca Reformasi*. Depok: Rajawali Pers, 2024.

Riyadi dan Deddy Supriadi Bratakusumah. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Rudy. *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*. Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2012.

Sadu Wasistiono, Etin Indrayani dan Andi Pitono. *Memahami Asas Tugas Pembantuan*. Bandung: CV Fokusmedia, 2006.

Syahri Thohir. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Sleman: Deepublish, 2013.

Syaukani, Afan Gaffar dan Ryaas Rasyid. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Wiwik Sri Widiaty. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2014.

Yusnani Hasyimzoem. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2017.

Jurnal

Abdul Rauf Alauddin Said. "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 4 (2015).

Arifuddin Nurdin. "Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 1 (2020).

Atius Inuk, Hiskia C.M. Sapioper, dan Yosephina Ohoiwutun. "Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Yahukimo." *Jurnal Kebijakan Publik* 8, no. 2 (2025).

Budi Setiawan. "Model Penjaringan Aspirasi Masyarakat sebagai Upaya Peningkatan Kinerja Anggota DPRD." *Sosiohumaniora* 15, no. 2 (2013).

Diane Prihastuti. "Tinjauan Yuridis Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Proses Pemerintahan Dikaitkan Undang-Undang 23 Tahun 2014." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 1 (2022).

Edgar Rangkasa. "Penyelenggaraan Otonomi Daerah Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat." *Lex Librum* 4, no. 1 (2017).

Elshi Elvira Rosianti, Jefik Zulfikar Hafizd, Mohamad Rana, dan Sugianto. "Kewenangan DPRD dan Kepala Daerah dalam Menetapkan Peraturan Daerah." *Hutanansyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2024).

Erik Porawouw. "Tugas dan Fungsi DPRD Propinsi terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah Menurut UU No 27 Tahun 2009." *Lex Administratum* 2, no. 2 (2014).

Erwin Hidayah Hasibuan. "Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah." *De Lega Lata* 3, no. 1 (2018).

Evi Oktarina. "Pelaksanaan Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah." *Justici* 17, no. 2 (2024).

Fatkhul Muin. "Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah." *Fiat Justisia* 8, no. 1 (2015).

Franky Djafar dan Rifka S. Akibu. "Relasi Nilai Politik, Proses Teknokratis, dan Partisipatif dalam Mengakomodir Kebutuhan Masyarakat Kota." *Jurnal Kolaboratif Sains* 6, no. 7 (2023).

Janson Rajagukguk dan Artha Lumbantobing. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegagalan Otonomi Pendidikan." *Jurnal Stindo Profesional* 4, no. 6 (2018).

Kusnandar Marsono Putro, Firstnandiar Glica Aini Suniaprily, dan Suharno. "Implementasi Sistem Otonomi Daerah di Indonesia." *Jurnal Bevinding* 2, no. 2 (2024).

Lola Fitria Sari, Maizul Rahmizal, Yulina Eliza, dan Gerry Hamdani Putra. "Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara." *Jurnal Pengabdian Kita* 6, no. 1 (2023).

Muhammad Arsyi Jailolo, Aminuddin Ilmar, dan Anshori Ilyas. "Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah." *Unnes Law Review* 5, no. 4 (2023).

Muhammad Raka Mahendra, Paisol Burlian, dan Yuswalina. "Analisis Fiqh Siyasah terhadap Peran DPR." *Jurnal Muqaranah* 5, no. 2 (2021).

Muhammad Sofian dan Fadil Muhammad. "Pemilihan Kepala Daerah dan Proses Deliberasi." *Cenderawasih Constitutional Review* 1, no. 1 (2025).

Nurul Astri Haliza, Azmi Fendri, Hengki Andora, Khairani, dan Anton Rosari. "Penganggaran Dana Pokok Pikiran DPRD dalam APBD." *Syntax Literate* 8, no. 1 (2023).

Ridwan Saifuddin, Irma Nurachmi, dan Decky Ferdiansyah. "Kualitas Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah." *Jurnal Kelitbangan* 10, no. 3 (2022).

Suci Oktapia, Nisa Nur Amanda, Mely Nur Ratman, dan Firman. “Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan Daerah.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 3 (2025).

Yayuk Whindari, Nurul Rahmawati, A Rizki Munshif Sya’bani, Any Ihsany Nasution, Nabila Alinda Ramadhani, Nathania Salsabilla Patricia Dewi, dan Salsa Afrieni. “Tinjauan Hukum Peran DPRD Kota Malang.” *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 6, no. 3 (2024).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 98 Tahun 2024 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sleman Tahun 2024-2028.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Peraturan DPRD Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Data Elektronik

BPS Kabupaten Sleman. "Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk." https://slemankab.bps.go.id/. Diakses 9 Juni 2025.

Birokrat Menulis. "Pokir Kebijakan yang Terabaikan." https://birokratmenulis.org/. Diakses 5 Agustus 2025.

JDIH Tanah Laut. "Fungsi Legislasi DPRD." https://jdih.tanahlautkab.go.id/. Diakses 10 Maret 2026.

Jafar Assagaf. "Keotentikan Ungkapan Imam Ali." https://surl.li/viflkh. Diakses 15 Maret 2026.

Birokrat Menulis. "Pokir Kebijakan yang Terabaikan." https://birokratmenulis.org/. Diakses 5 Agustus.